BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah. Sebagai aktor dalam politik global negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang *unitary* dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren. Selain negara pun ada banyak aktor lain seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional (Jemadu, 2008:46). Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme) (Perwita & Yani, 2005:7).

Hubungan internasional adalah suatu upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara karena makin banyaknya kompleksitas yang dihadapi masyarakat dunia internasional ini menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. semakin banyaknya interdependensi menyebabkan tidak adanya satu negara didunia ini yang dapat menutup diri dari dunia luar, karena kebutuhan setiap negara

makin kompleks. Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (state-actor) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (non-state actor). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (coorperation), persaingan (competition), dan pertentangan (conflict) (Rudy, 2003 : 2).

Robert Jackson dan Georg & Sorensen juga mengatakan, bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson & Sorensen, 2009:34). Sistem internasional menjadi semakin kompleks pasca berakhirnya perang dingin, dimana selama perang dingin sistem internasional lebih fokus pada isu-isu high politics seperti perang, politik, keamanaan dan militer bergeser ke low politics seperti masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi, budaya dan terorisme.

2.1.2 Diplomasi dan Negosiasi

Diplomasi dalam ilmu hubungan internasional merupakan suatu istilah yang memiliki pengertian berbeda bergantung dari pengguna dan penggunaannya. Dalam dunia politik, diplomasi mengacu pada proses komunikasi antara aktor-aktor

internasional yang berusaha untuk menyelesaikan konflik melalui proses negosiasi. (Brian White (2005). Dengan demikian, cukup jelas bahwa diplomasi adalah sebuah cara untuk menjalin kerjasama dalam hubungan internasional demi mencapai kepentingan bersama, yang dapat dilakukan dengan bernegosiasi. Berdasarkan sejarah, peradaban pertama yang melahirkan konsep pengiriman duta besar adalah kekaisaran Romawi.

Hubungan bilateral di asumsikan sebagai hubungan antar dua negara. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya bahkan dalam olahraga sekalipun. Hubungan bilateral tersebut terealisasi berkat adanya diplomasi intens, terus-menerus dan berkelanjutan yang dilakukan oleh para pihak yang mengadakan hubungan bilateral tersebut. Pendekatran diplomasi maupun jenis diplomasi yang digunakan pun bermacam-macam yang disesuaikan dengan kondisi bidang kerjasamanya. Misalnya diplomasi resmi melalui pemerintah/negara secara langsung (first track diplomacy), melalui aktor non negara (second track diplomacy), atau pun gabungan dari keduanya (multi track diplomacy).

Diplomasi merupakan salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional. Dalam pendekatan tradisional, diplomasi didefinisikan sebagai sebuah seni bernegosiasi dengan negara yang lain. Dalam perkembangan diplomasi saat ini, beberapa telah meninggalkan sisi tradisionalnya yaitu dominasi negara. Telah terjadi perubahan sifat diplomasi yang mana diplomasi megarah pada manajemen hubungan antara negara dan actor hubungan internasional yang lain (Samuel P Hutington, 1992,

The Third Wave : Democratization in The Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press).

Diplomasi menjadi salah satu instrumen bagi politik luar negeri untuk dapat mencaai tujuan dana tau kepentingan nasionalnya. Salah satu tugas utama diplomasi adalah berusaha untuk menerapkan keinginan dan pikiran suatu pemerintah dan bangsa pada keinginan masyarakat negera yang didekati. Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan politik luar negeri, dikarenakan diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih (Sukawarsini Djelantik, 2008: 113).

Negosiasi dilakukan untuk mendapatkan solusi terhadap suatu permasalahan melalui jalan damai. Menurut Lewicki (2009), terdapat beberapa unsur dalam negosiasi salah satunya adalah tujuan negosiasi. Hal ini dikarenakan tujuan dapat menentukan jalannya negosiasi dan penetapan strategi dalam bernegosiasi. Unsur kedua yang terkait dengan unsur berikutnya adalah strategi. Strategi merupakan rencana yang digunakan agar proses negosiasi tersebut berhasil mencapai tujuannya. Negosiasi sendiri merupakan salah satu bagian penting dalam proses diplomasi. Untuk dapat melakukan proses negosiasi dengan baik, maka dibutuhkan sebuah etika dalam bernegosiasi yang diakui oleh seluruh pihak. Etika berperan penting karena keberadaannya merupakan standar dalam berkomunikasi sehingga praktik diplomasi dan negosiasi dapat dipahami oleh pihak-pihak terkait. Salah satu etika yang diterima oleh mayoritas negara adalah etika berpakaian dan etika table manner.

Dalam menghadiri acara resmi, perwakilan negara disarankan menggunakan pakaian resmi berupa jas dan dasi bagi pria serta gaun dengan gaya sederhana. Namun, ada beberapa etika lain yang tidak memiliki patokan pasti seperti etika dalam memberi salam. Hal ini dikarenakan oleh adanya perbedaan kebudayaan antar bangsa. Sebagai contoh, perwakilan dari Timur Tengah cenderung memilih untuk tidak bersentuhan secara langsung terhadap lawan jenis. Selain etika, dibutuhkan sebuah bahasa yang dijadikan standar komunikasi dalam proses diplomasi dan negosiasi atau lingua franca. Menurut Cohen (2005), bahasa Inggris merupakan lingua franca internasional saat ini. Hal ini tidak terlepas dari faktor sejarah yaitu banyaknya koloni Inggris di era kolonialisme, sehingga bahasa Inggris banyak digunakan di seluruh dunia. Bahasa Perancis juga sempat menjadi lingua franca, namun bahasa Inggris dianggap lebih layak karena penutur bahasa Inggris lebih banyak serta struktur bahasa yang lebih mudah. (Cohen, Steven. (2005). Are Many Great Nations Divided by a "Common" Language? [Online]. Tersedia di: http://negotiatormagazine.com/article300_1.html. [Diakses pada 4 April 2016])

2.1.2.1 Diplomasi Publik

Menurut Paul Sharp (dalam D'Hooghe, 2007:5), diplomasi publik merupakan proses diplomasi yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah terhadap masyarakat, baik masyarakat di negaranya maupun negara lain untuk meningkatkan kepentingan dan memperluas nilai-nilai. Diplomasi publik juga digunakan pemerintah untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat. Pelaksanaan

diplomasi publik dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa media, seperti budaya dan pendidikan. Contoh dari diplomasi publik yaitu diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia paska terjadinya bom Bali. Pemerintah Indonesia giat mempromosikan kembali tempat-tempat wisata yang ada di Bali kepada masyarakat Indonesia dan internasional. Dengan menggunakan media komunikasi, pemerintah meyakinkan turis-turis domestik dan mancanegara bahwa Bali sudah kembali aman sehingga tidak perlu ada kekhawatiran untuk mengunjungi pulau Bali.

Kata diplomasi publik pertama kali digunakan di media *The London Times* pada bulan Januari 1856. Mereka menggunakan kata ini untuk mengkritik kebijakan Presiden Franklin Pierce dan mendorongnya untuk memberikan contok kepada warga dalam proses diplomasi. Atau dengan kata lain, diplomasi publik dalam konteks ini didefinisikan sebagai sebuah cara untuk menjelaskan kebijakan kepada publik. Pada bulan Januari 1871, *The New York Times* melaporkan perdebatan di Konggres tentang intrik rahasia dalam kebijakan menganeksasi Republik Dominika. Dalam laporan itu disampaikan bahwa kebijakan seharusnya dibuka atau disampaikan kepada publik untuk mendapatkan atau membentuk opini publik untuk mendapatkan atau opini publik dalam konteks diplomasi publik.

Dari sudut pandang media massa, kata diplomasi publik juga digunakan oleh pemimpin politik seperti Presiden Wilson pada tahun 1918 yang menyampaikan empat prinsip dalam pemerintahanyan. Dalam periode ini, diplomasi publik lebih didefinisikan pada usaha untuk membuka atau menyampaikan kebijakan kepada

publik. Hal ini berarti bahwa diplomasi lebih kedalam dalam artian untuk menjelaskan kebijakan kepada publik didalam negeri. Pasca perang dunia, konsep diplomasi publik lebih banyak digunakan atau sebagai penyamaran atas apa yang disebut dengan propaganda (Nicholas J Cull, "'Public Diplomacy' before Gullion : The Evolution of a Phrase", http://uscupublicdiplomacy.com/pdfs/gullion.pdf,acce ssesd on December20,2009).

Dimulai pada tahun 1960an, praktek diplomasi mulai mengalami peruabahan. Professor Mowat dalam bukunya *Diplomacy and Peace* membagi diplomasi dalam tiga masa perkembangan. Ketiga masa perkembangan tersebut adalah pada tahun 1467-1475 yang disebut dengan masa kegelapan dimana diplomasi belum diorganisasi dengan baik. Kemudian pada tahun 1473-1914 yang disebut dengan diplomasi sistem negara Eropa, dan pasca Diplomasi Terbuka (*open diplomacy*) sebagai hasil pemikiran dari Woodrow Wilson pada tahun 1918. (Yulius P Hemawan (ed), 2007, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, isu dan Metodologi* (Transformation in the International Realtions Studies : Actors, Issues and Methodology), Graha Ilmu Bandung, halaman. 52).

Adapun dalam Diplomasi Publik yang di sebut dengan diplomasi publik monolog, yaitu komunikasi satu arah merupakan bentuk baku bagi seseorang atau sekelompok orang yang ingin menyampaikan sebuah informasi. Adanya tujuan yang lebih dari sekedar informasi seperti menginginkan penerima informasinya percaya, terpengaruh dan berperilaku seperti yang diinginkan pemberi informasi menjadikan

upaya tersebut disebut sebagai propaganda. Komunikasi satu arah atau monolog diakui memiliki tempat dalam diplomasi publik (Iva Rachmawati : 67).

2.1.3 Strategi

Strategi secara umum adalah seluruh keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang akan dan harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan. Merumuskan suatu strategi berarti memperhitungkan semua situasi yang mungkin dihadapi pada setiap waktu di masa depan dan kemudian hari semenjak sekarang sudah menetapkan atau menyiapkan tindakan mana yang akan diambil atau dipilih kelak, guna menghadapi realisasi dari setiap kemungkinan tersebut.

Strategi dirumuskan tidak hanya dalam "mileu" waktu, ia juga memperhitungkan "mileu" ruang. Didalam realitasnya yang menyangkut tentang strategi pertahanan dan keamanan merupakan suatu keseluruhan yang dapat dibedakan antara strategi pertahanan dan strategi keamanan. Perbedaan antara strategi pertahanan dan strategi keamanan disebabkan oleh sebab initial yang harus diperhitungkan didalam kedua jenis strategi tadi. Strategi pertahanan dirumuskan untuk menghadapi gangguan-gangguan terhadap kemerdekaan nasional yang sebab initialnya dating dari luar wilayah nasional. Strategi keamanan dirumuskan untuk menanggulangi gangguan terhadap security nasional yang sebab initialnya dating atau timbul dari dalam negeri sendiri.

Strategi yang lebih luas ini mencakup hal-hal seperti negosiasi, tindakan ekonomi, perang urat syaraf. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sun-Tzu yang menyatakan "mengalahkan musuh tanpa pertempuran adalah puncak dari keterampilan". Sikap strategis harus dapat menyesuaikan agar dapat menkhususkan kebutuhan/kepentingan. Menurut Carl Von Clausewits (Carl Philipp Gottfried) (1780-1831) seorang ahli strategi dan peperangan, Pengertian strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan "the use of engagements for the object of war" . Kemudian dia menambahkan bahwa politik atau policy merupakan hal yang terjadi setelah terjadinya perang.

Menurut *bussinesdictionary*, pengertian strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah; pengertian strategi adalah seni dan ilmu perencanaan dan memanfaat sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif. Istilah srategi berasal dari kata Yunani untuk ahli militer atau memimpin pasukan. Menurut Henry Mintzberg (1998), seorang ahli bisnis dan manajemen, bahwa pengertian strategi terbagi atas 5 definisi yaitu strategi sebagai rencana, strategi sebagai pola, strategi sebagai posisi (positions), strategi sebagai taktik (ploy) dan terakhir strategi sebagai perpesktif (Ade Priangani-Oman Heryaman 2003:9)

Perkataan strategi berasal dari kata Yunani "strategus" yang di artikan sebagai "the art of the general". Jauh sebelum abad ke-19 nampak bahwa kemenangan sesuatu bangsa atas peperangan, banyak bergantung kepada adanya panglima-

panglima perang yang ulung dan bijaksana. Alexnadre Agung dapat menguasai suatu wilayah antara Yunani dan India diwaktu antara 334 dan 323 SM ; Hannibal memperoleh kemenangan kemenangan gemilang atas tentara Roma dalam Perang Punic II di waktu antara 216 dan 201 SM; Julius Caesar mencapai rangkaian kemenangan pada medan peperangan yang dimulai dari wilayah Inggris sampai ke wilayah Asia kecil dan sebagai daratan Eropa di waktu antara 45 dan 44 SM(Kajian Strategis-Ade Priangani-Oman Heryaman 2003/14).

2.1.4 Nasionalisme

Pembentukan bangsa suatu gerakan sosial-politik yang ditentukan oleh representasi budaya. Dapat dilihat perbedaan yang sangat jauh antara nasionalisme pada saat pergerakan nasional dengan nasionalisme masa kini. Dengan adanya pengaruh globalisasi yang tidak disaring dan dibatasi oleh kemampuan masing-masing individu sebagai warganegara, menunjukkan bahwa pengaruh budaya global menentukan seperti apa nasionalisme bangsa ini. Sedikit sekali kecintaan terhadap bangsa, produk dalam negeri dan kepercayaan terhadap bangsa sendiri. Kesadaran memiliki bangsa. Budaya bangsa yang semakin terkikis menunjukkan bahwa pemiliknya sendiri kurang merawat dan melestarikan. Hal ini menunjukkan kurangnya rasa cinta dan kesadaran bahwa kita punya bangsa dan harus menjaga dan melestarika symbol-simbol yang mencerminkan keberadaannya. Memiliki bahasa dan simbol sebagai ciri khas. Bahasa dan simbol merupakan hasil budaya. Ideologi nasionalisme yang kuat dapat mempertahankan budaya bangsa. Mari kita lihat

Negara Amerika sebagai suatu Negara yang kuat ideologinya, sehingga dalam masa globalisasipun mereka dapat menjaga bahasa dan simbol budayanya dibuktikan dengan semakin mendunianya bahasa Inggris. Nasionalisme dapat juga diartikan sebagai paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan Negara (nation) dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Bersumber dari teori romasntisme yaitu "identitas budaya", debat liberalism yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu. Bertolak dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah paham yang meletakan kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada Negara dan bangsanya, dengan maksud bahwa individu sebagai warga Negara memiliki suatu sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikiranya semi kemajuan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan Negara dan bangsa.

Ikatan nsaionalisme tumbuh ditengah masyarakat saat pola pikiranya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tidak beranjak dari wilayah tersebut. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempat hidup. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila

suasanya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini.

Hal – hal yang mendorong munculnya faham nasionalisme , antara lain :

1. Adanya campur tangan bangsa lain misalnya penjajahan dalam wilayahnya.
2. Adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut , agar manusia mendapatkan hak – haknya secara wajar sebagai warga negara.
3. Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan.
4. Bertempat tinggal dalam suatu wilayah.

Prinsip – prinsip nasionalisme, menurut Hertz dalam bukunya Nationality in History and Policy, antara lain :

1. Hasrat untuk mencapai kesatuan
2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan
3. Hasrat untuk mencapai keaslian
4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa.

Banyak para tokoh nasionalis yang memang iklas berjuang untuk bangsanya. Mereka dapat berupa pemikir, pejuang dan lain - lain. Hal itu memang mereka sumbangkan untuk berbhakti kepada bangsa demi seluruh masyarakat yang ada di bangsa tersebut.

Ada 2 (dua) macam nasionalisme :

1. Nasionalisme dalam arti sempit : paham kebangsaan yang berlebihan dengan memandang bangsa sendiri lebih tinggi (unggul) dari bangsa lain. Paham ini sering disebut dengan istilah "*Chauvinisme*". Chauvinisme pernah dianut di Italia (masa Bennito Mussolini); Jepang (masa Tenno Haika) dan Jerman (masa Adolf Hitler).
2. Nasionalisme dalam arti luas : paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnnya dengan memandang bangsanya itu merupakan bagian dari bangsa lain di dunia. Nasionalisme arti luas mengandung prinsip-prinsip : kebersamaan; persatuan dan kesatuan; dan demokrasi (demokratis).

Ada beberapa bentuk Nasionalisme :

Nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil) adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan (partisipasi) aktif rakyatnya. Nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organic, nasionalisme identitas) adalah nasioalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah yang merupakan ekspresi dari sebuah bangsa atau ras. Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun temurun seperti warna kulit, ras ataupun bahasa. Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan.

Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah '*national state'* adalah suatu argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri. Contoh biasa adalah Nazisme, Fasisme, serta Nasionalisme Turki kontemporer, dan sebagainya. Nasionalisme agama adalah sejenis nasionalisme dimana Negara memperoleh legimitasi politik dari persamaan agama. Misalnya, di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka yaitu Katolik. Nasionalisme di India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP bersumber dari agama Hindu. Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan. Para ilmuan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti nasionalis sosialisme, pengasingan dan sebagainya

Nasionalisme merupakan konsep yang berkaitan dengan identitas suatu bangsa dalam wilayah tertentu. Dalam ilmu Hubungan Internasional pasca perjanjian Westphalia 1648, dikenal konsepsi negara-bangsa. Secara sekilas nasionalisme mengarah kepada konsepsi negara-bangsa, namun konsepsi bangsa sendiri masih bisa diperdebatkan bagaimana secara lebih jelasnya. Nasionalisme dapat juga dilihat sebagai pendorong bagaimana negara berhubungan dengan negara lainya. Kepentingan negara yang menjadi dasar melakukan hubungan dengan negara lain juga merupakan bagian dari nasionalisme. Kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia setelah Perang Dunia ke 2 juga didasari oleh rasa kebangsaan yang tidak ingin

dijajah. Keinginan bangsa-bangsa di dunia untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal ini juga bagian dari diskusi mengenai nasionalisme dalam Hubungan Internasional(http//id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2164608-pengertian-nasionalisme/ Diakses tanggal 22 Maret 2016).

Konsep nasionalisme sangat erat kaitanya dengan konsep bangsa dan identitas nasional. Branka Panic mendefinisikan *national identity* mencakup komuitas politik, institusi yang sama dan memiliki satu aturan hak dan kewajiban bagi semua anggota komunitas. Identitas ini juga mencakup ruang sosial dan geografi dimana para anggota merasa menjadi bagian dari ruang-ruang tersebut. Berkaitan dengan identitas nasional ini tidak terlepas dari akan pembahasan konsep *nation* (bangsa) (Branka Panic, 2009, "Societal Security – Security and Indentity", dalam *Western Balkan Security Observers,* No.13, hlm. 31).

2.1.5 Konflik

Konflik merupakan suatu situasi dimana terjadi persaingan untuk memenuhi tujuan yang tidak selaras dari kelompok-kelompok yang berbeda. (Hugh Miall, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras.* Jakarta: Rajawali Press, 2002: 8).

Menurut Peter Wallensteen, konflik merupakan sebuah situasi social dimana terdapat setidaknya dua actor yang berada dalam kelompok yang berbeda dan berusaha untuk memperoleh serangkaian sumber daya pada saat yang sama dalam

kurun waktu tertentu (Peter Wallensteen, *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System* SAGE Publication, 2002: 4).

Berdasarkan perspektif politik global, seperti yang ditulis oleh Peter Wallensteen terdapat 3 tipe konflik internasional, yaitu :

1. Konflik Internal (*intra-state conflict/internal conflict),* yang memiliki dimensi secara internasional.
2. Konflik antar negara (*interstate conflict/ international conflict).*
3. Konflik yang berkaitan dengan pembentukan negara (*state formation conflict*).

Konflik *intra-state* sendiri dapat dimaknai sebagai konflik yang terjadi dan aktor yang terlibat berada di dalam negara sendiri. Konflik *intra-state* merupakan kekerasan atau pertikaian politik yang penyebab utamanya karena faktor domestik ketimbang faktor sistemik dimana pertikaian itu melibatkan kekerasan dengan penggunaan senjata yang terjadi didalam sebuah negara (Michael E. Brown (ed), *The International Dimensions of Internal Conflict,* Cambridge, MA: MIT Press, 1996: 9).

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik *intra-state* dapat berupa faktor kultural, krisis pemerintahan, etnis atau bahkan agama. Konflik *intra-state* dapat menimbulkan dampak yang cukup luas, baikk itu berupa kerusakan lingkunagn, stabilitas kawasan yang dapat terganggu, terkucilkannya sebuah negara di mata dunia internasional, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa yang tidak

sedikit. Kumar Rupsinghe membagi tipe konflik *intra-state* kedalam lima kategori, yaitu :

a. Konflik ideologi: merupakan suatu konflik yang terjadi karena adanya pertentangan paham ideology/politik antar dua atau lebih kelompok. Salah satu contoh konflik *intra-state* yang disebabkan karena perbedaan ideologis adalah yang terjadi di India yaitu antara suku Assam dan Naga yang memliki perbedaan ideology Sosialisme dan Maoisme.
b. Konflik identitas/etnis: konflik ini seringkali, menjadi sumber utama dari terjadinya konflik-konflik *intra-state* di duni. Salah satu penyebab munculnya konflik etnis ialah ketika suatu kelompok minoritas dalam sebuah negara, yang merasa berbeda secara etnis, berusaha untuk memisahkan diri dari pemerintahan. Salah satu contok konflik *intra-state* yang disebabkan karena adanya perbedaan etnis adalah suku Pasthun di Pakistan atau Tamil di Srilanka.
c. Konflik agama dan fundamentalisme: agama juga seringkali menjadi alasan terjadinya konflik *intra-state* yaitu ketika agama dianggap sebagai sebuah bentuk identitas yang tidak memperoleh porsi akomodasi yang tepat dari pemerintah.
d. Konflik antara pemerintah/penguasa dengan masyarakat: konflik ini seringkali terjadi karena tidak meratanya pembagian kekuasaan atau kewenangan masyarakat dalam pemeintahan (desentralisasi). Umunya,

masyarakat akan berkonflik dengan pemerintah ketika masyarakat menginginkan porsi politik yang lebih besar dalam suatu negara atau ketika proses demokrasi tidak berjalan dengan baik.

e. Konflik militerisme/kekerasan: konflik yang berujung pada kekerasan ini seringkali terjadi karena pemerintah menggunakan kemampuan miiternya untuk tetap mengendalikan situasi di masyarakat atau mempertahankan kekuasaanya

(Kumar Rupesinghe dan Khawar Mumtaz, *Internal Conflict in South Asia*, London: sage Publication, 1996: 12).

Secara khusus, konflik etnis memiliki tiga model konflik yang dapat menjelaskan bagaimana relasi konflik tersebut dapat terjadi. Adapun model konflik tersebut adalah :

1. Bahwa konflik etnis disebabkan oleh karena semangat primordialisme yang sempit dan menginginkan satut superioritas oleh satu etnis terhadap etnis lainya. Model primordialisme ini sangat kuat membangun hubungan kekeluargaan di dalam etnis. Konflik ini dapat dilihat misalnya pada kasus konflik di sejumlah negara Afrika, kususnya konflik antara etnis Hutu dan etnis Tutusi di Rwanda dan Burundi di Afrika.
2. Bahwa konflik etnis terjadi karena ada yang menggerakan atau ada yang memimpin proses tersebut. Konflik etnis seperti ini hamper selalu digerakan oleh elit politik dengan semangat yang sempit, dan biasanya

tuntutanya adalah kemerdekaan atau lepas dari negara induk. Hal ini bisa dilihat dalam kasus berpisahnya Eritria dari Ethiopia, atau semangat disintegrasi yang disuarakan oleh etnis Tamil , dengan Gerakan Perlawanan Macan Tamil Aelam.

3. Konflik etnis terbangun oleh elit politik atau oleh penguasa. Model ini disebut senagai konstrukivisme. Sebagaimana diketahui, banyak penguasa melakukan berbagai cara agar kekuasaanya tetap langgeng
   (Muradi, "Konflik Kontemporer sebagai Pengganti Perang", http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/pustaka_unpad_konflik_kontemporer.pdf/ diakses pada tanggal 8 April 2016).

2.1.6 Separatisme

Separatisme adalah suatu paham atau gerakan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Separatism merupakan gerakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk menyempal atau memisahkan diri dari negara lama yang sudah ada guna membentuk atau mendirikan negara sendiri yang merdeka dan berdaulat. Sekelompok masyarakat yang melakukan gerakan separatis dapat berasal dari daerah atau provinsi tertentu, etnik tertentu, atau komunitas tertentu. Hal yang memotivasi mereka untuk memisahkan diri dan mendirikan negara tersendiri dapat berupa kesamaan nasib, visi, misi, dan sebagainya. Perasaan kecewa dan tidak puas akibat berbagai perlakuan diskriminatif dan pembagian hasil pengelolaan sumber

daya alam yang timpang dari pemerintah pusat juga dapat mendorong sekelompok masyarakat untuk melakukan separatisme.

Separatisme merupakan gerakan yang berbahaya. Jika tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat, separatisme dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa dan negara, sebagaimana yangterjadi dan dialami oleh Uni Soviet dan Yugoslavia pada awal tahun 1990-an. Separatisme dapat diantisipasi serta dicegah dan ditanggulangi dengan cara memberikan perlakuan yang adil dan merata dalam segala hal kepada semua etnik, suku, dan masyarakat di setiap provinsi.

Gerakan ini muncul dari berbagai aspek diantaranya adalah :

1. Ketidakpuasaan akan kinerja pemerintahan maka munculah ide-ide untuk membentuk suatu gerakan yang memilik misi dan visi yang berbeda dalam menyaingi keadan yang sudah ada dalam birokrasi dan tatanan yang sudah ada sebelumnya
2. Kondisi plotik,ekonomi,sosial,budaya yang dalam pemikiran sejumlah kelompok tidak wajar,maka cendrung mereka ingin bebas dan keluar dari aturan itu dan memilih membrontak dari kebijakan yang ada dan ingin merdeka dengan caranya sendiri.
3. Pemahaman terhadap keyakinan dan ini cendrung mengarah pada pahamseparatisme,dan merusak tatanan nilai dan moral yang ada,serta dapat menimbulka perpecahan (Akhmad Zamroni, Separatisme : 29).

2.2 Kerangka Pemikiran

Perang sipil yang terjadi di Spanyol pada abad ke-17 yang mengakibatkan adanya permusuhan antara kaum nasionalis dan republikan hingga menimbulkan keinginan masyarakat *Catalonia* untuk merdeka dan mempunyai pemerintahan mandiri. Mereka menuntut kemerdeekaan dari pemerintah Spanyol yang dianggap tidak adil dalam menjalankan pemerintahan. Berbagai cara dilakukan pemerintah *Catalonia* untuk mendapat kemerdekaan penuh dari pemerintahan Spanyol. Dalam kasus ini teori hubungan internasional sangat erat kaitanya dengan negara sebagai aktor yang *unitary* dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Konflik kepentingan ekonomi diantara negara-negara di dunia. Teori hubungan internasional dilakukan oleh negara-negara karena makin banyaknya kompleksitas yang dihadapi masyarakat dunia dunia internasional ini menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain.

Salah satu contohnya yaitu melalui olahraga sepak bola, dimana pemerintah *Catalonia* menjadikan klub sepak bola Fc Barcelona sebagai simbol penyebaran nasionalisme masyarakat *Catalonia* untuk meraih simpati dan dukungan dari wilayah maupun negara lain. Dalam diplomasi publik ini, masyarakat *Catalonia* diharapkan dapat berperan baik dalam konteks individu maupun kelompok dapat memberikan inisiatif kepada kebijakan pemerintah dan termasuk didalamnya aktifitas yang seharusnya dapat membentuk opini publik di negara lain. Diplomasi publik juga semakin menurunkan derajat perbatasan Negara. Melalui klub sepakbola ini,

pemerintah *Catalonia* melakukan suatu diplomasi dan negosiasi untuk mencapai hal yang diinginkan, yaitu merdeka dari Spanyol. Dalam dunia politik, diplomasi mengacu pada proses komunikasi antara aktor-aktor internasional yang berusaha untuk menyelesaikan konflik melalui proses negosiasi.

Diplomasi menjadi salah satu cara mereka dalam upaya melepaskan diri dari Spanyol. Diplomasi yang di lakukan *Catalonia* yaitu diplomasi publik, dimana pemerintah *Catalonia* langsung meminta dukungan simpati dan dukungan dari masyarakatnya yang berada di wilayah *Catalonia* sendiri maupun yang berada diluar kawasan nya.

Strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah *Catalonia* yaitu salah satunya penyebaran nasionalisme melalui sepakbola dan juga diaspora. Dalam hal ini, posisi politik domestik *Catalonia* sebagai kelompok bangsa akan mempengaruhi bagaimana identitas bangsa *Catalonia*. Konsep nasionalisme sangat erat kaitannya dengan konsep bangsa dan identitas nasional. Identitas ini juga mencakup ruang sosial dan geografi di mana para anggota merasa menjadi bagian dari ruang - ruang tersebut. Berkaitan dengan identitas nasional ini tidak akan lepas dengan pembahasan konsep *nation* (bangsa). Untuk melancarkan misi mereka dalam melepaskan diri dari Spanyol, masyrakat *Catalonia* membentuk gerakan separatisme untuk mendesak pemerintah Spanyol agar cepat melepaskan *Catalonia* dari Spanyol.

Berbagai upaya dilakukan *Catalonia* dalam mendapat pengakuan atas identitas bangsa *Catalonia,* salah satunya adalah melalui klub sepakbola FC

Barcelona. Bagi bangsa *Catalonia*, klub sepakbola ini adalah representasi identitas dan harga diri mereka. Pembentukan bangsa suatu gerakan sosial-politik yang ditentukan oleh representasi budaya. Dapat dilihat perbedaan yang sangat jauh antara nasionalisme pada saat pergerakan nasional dengan nasionalisme masa kini.

Perang sipil Spanyol adalah perang saudara yang terjadi di tanah Spanyol antara tahun 1936 sampai 1939. Konflik ini melibatkan kubu republikan atau kubu yang pro-reformasi pasca tumbangnya Kerajaan Spanyol (mayoritasnya dari golongan komunis, liberalis, dan anarkis) melawan kubu nasionalis Spanyol atau kubu anti-reformasi (mayoritasnya dari golongan militer senior, kerajaan, dan Gereja Katolik). Pasca berakhirnya perang, Spanyol berada dalam kondisi porak-poranda dan rezim diktator berhaluan sayap kanan ekstrim (fasis) didirikan di negara tersebut. Konflik ini merupakan konflik dalam negeri yang menyebar diluar negara tersebut. Konflik *intra-state* sendiri dapat dimaknai sebagai konflik yang terjadi dan aktor yang terlibat berada di dalam negara sendiri. Konflik *intra-state* merupakan kekerasan atau pertikaian politik yang penyebab utamanya karena faktor domestik ketimbang faktor sistemik dimana pertikaian itu melibatkan kekerasan dengan penggunaan senjata yang terjadi didalam sebuah negara

Muncul gerakan separatisme dari masyarakat *Catalonia.* Sekelompok masyarakat yang melakukan gerakan separatis dapat berasal dari daerah atau provinsi tertentu, etnik tertentu, atau komunitas tertentu. Hal yang memotivasi mereka untuk memisahkan diri dan mendirikan negara tersendiri dapat berupa kesamaan nasib, visi,

misi, dan sebagainya. Kedudukan separatisme dalam hal ini adalah hanya sebagai gertakan untuk kelompok pro-kemerdekaan memenangkan Pemilu parlemen di *Catalonia*. Namun mereka tidak ingin dalam aksi separatisme nya ini akan menimbulkan suatu perang atau pertumpahan darah. Separatisme dalam hal ini yaitu pemerintah *Catalonia* hanya mengukuhkan bahwa wilayahnya tersebut ingin meraih kemerdekaan dari Spanyol. Oleh karena itu pemerintah *Catalonia* melakukan diplomasi publik untuk menghindari peperangan diantara masyarakat *Catalonia* dan pemerintahan Spanyol yang menolak untuk memberikan kemerdekaan kepada wilayah *Catalonia*.